

PROSEDUR KOMUNIKASI

Lembar Fakta No. 7

Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia

PENGANTAR

Siapapun dapat mengajukan masalah hak asasi manusia untuk diperhatikan PBB, dan ribuan orang di seluruh dunia melakukannya setiap tahun. Komunikasi tentang hak asasi manusia seperti apakah yang dapat diterima oleh PBB, dan bagaimanakah PBB menanganinya? Lembar Fakta ini menjelaskan prosedur dan cara-cara yang terbuka bagi individu dan kelompok, yang ingin agar PBB mengambil tindakan dalam situasi hak asasi manusia yang menjadi perhatian mereka.

Dari Awalnya.....

Komisi Hak Asasi Manusia PBB melihat bahwa prosedur mengajukan komunikasi dibutuhkan, sejak mereka berkumpul untuk pertama kalinya pada 1947. Prosedur kemudian ditetapkan dan sejak saat itu diperbaiki dan diperluas jangkauannya selama bertahun-tahun. Berdasarkan kenyataan bahwa prosedur itu ada dan sering kali digunakan, merupakan suatu senjata yang kuat dalam memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menghalangi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pada 1959 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB memutuskan bahwa daftar komunikasi yang bersifat rahasia yang mengadukan pelanggaran hak asasi manusia kepada PBB, disampaikan ke Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas PBB.¹ Identitas para pembuatnya tidak diungkapkan kecuali jika mereka tidak berkeberatan untuk diungkap. Pemerintah Negara yang dituju dalam komunikasi itu menerima salinannya, dan tanggapan mereka juga disampaikan ke Komisi Hak Asasi Manusia.

Dewan Ekonomi dan Sosial pada 1967, memberikan wewenang kepada Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas untuk "memeriksa informasi yang relevan dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kebebasan-kebebasan dasar di semua Negara". Dewan memutuskan bahwa Komisi dapat "... melakukan kajian terhadap situasi-situasi yang mengungkapkan pola tetap pelanggaran hak asasi manusia ...," melaporkan, dan membuat rekomendasi mengenai pelanggaran ini kepada Dewan,² dalam kasus yang layak.

Hal ini merupakan langkah maju yang penting. Langkah lain menyusul pada 1970 ketika Dewan Ekonomi dan Sosial menetapkan "prosedur untuk menangani komunikasi sehubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar".³ Ini dikenal dengan prosedur "1503" yang berasal dari nomor resolusi Dewan yang mengaturnya. Prosedur ini tidak menangani kasus-kasus perorangan, akan tetapi hanya situasi yang mempengaruhi sejumlah besar masyarakat dalam waktu yang berlarut-larut.

Kemungkinan untuk menangani kasus perorangan mulai terbuka sejak Protokol Opsional dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik diberlakukan pada 1976.

Pertama-tama, Lembar Fakta ini akan melihat prosedur "1503" yang menyangkut situasi-situasi, kemudian prosedur "Protokol Opsional," dan akhirnya jalur-jalur lain yang dipakai oleh PBB dan badan-badan khususnya untuk mempertimbangkan pelanggaran hak asasi manusia.

¹ Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 728F (XXVIII) tanggal 30 Juli 1959.

² Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1235 (XLII) tanggal 6 Juni 1967.

³ Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1503 (XLVIII) tanggal 27 Mei 1970.

”POLA TETAP PELANGGARAN-PELANGGARAN” (“PROSEDUR 1503”)

Sistem yang Bekerja

Setiap bulan, anggota Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas – para pakar hak asasi manusia yang bekerja sesuai dengan kapasitas pribadi mereka – menerima daftar komunikasi dengan penjelasan singkat dalam setiap kasus dari Sekretaris Jenderal PBB, dan tanggapan dikirim oleh Pemerintah-pemerintah. Daftar ini juga diberikan kepada anggota Komisi Hak Asasi Manusia.

Kelima anggota Kelompok Kerja dari Sub-Komisi berkumpul selama dua minggu setiap tahun sebelum sidang tahunan Sub-Komisi. Kelompok Kerja mempertimbangkan semua komunikasi dan tanggapan pemerintah dan menyeleksi kasus-kasus yang kelihatannya mempunyai bukti yang dapat diandalkan mengenai pola tetap dari pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang serius, untuk diperhatikan oleh Sub-Komisi; sebagai contoh: situasi yang mempengaruhi sejumlah besar masyarakat dalam waktu yang berlarut-larut.

Mayoritas anggota Kelompok Kerja dibutuhkan untuk menyampaikan komunikasi ke Sub-Komisi. Tindakan lebih lanjut tidak akan diambil, apabila Kelompok Kerja tidak menyampaikan komunikasi kepada Sub-Komisi.

Sub-Komisi kemudian mempertimbangkan komunikasi yang diajukan kepadanya oleh Kelompok Kerja, dan Sub-Komisi harus memutuskan akan disampaikan atau tidaknya situasi-situasi dimana muncul pola tetap dari pelanggaran hak asasi manusia ke Komisi Hak Asasi Manusia.

Kemudian akan kembali kepada Komisi untuk menentukan apakah suatu kajian terhadap situasi tertentu diperlukan, dengan suatu laporan dan rekomendasi kepada Dewan Ekonomi dan Sosial. Komisi dapat memutuskan untuk menunjuk Komite sementara (ad hoc) untuk melakukan investigasi, akan tetapi hal ini membutuhkan ijin dari Negara tempat pelanggaran diduga telah terjadi.

ABC dari Komunikasi Hak Asasi Manusia

Untuk memutuskan apakah komunikasi dapat diterima untuk dikaji, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas telah menetapkan aturan-aturan prosedural.⁴

Hal pertama yang diatur dalam aturan-aturan ini adalah bahwa tujuan dari komunikasi tidak boleh bertentangan dengan asas-asas dalam Piagam PBB, DUHAM, dan perjanjian hak asasi manusia yang berlaku lainnya, konvensi, dan lain-lain.

Suatu komunikasi akan diakui hanya apabila dalam proses pertimbangannya menunjukkan adanya alasan yang layak untuk dipercayai – tanggapan yang dikirim oleh Negara-negara yang bersangkutan juga diperhitungkan – bahwa ada pola tetap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang serius dan terbukti dapat dipercayai kebenarannya.

Komunikasi dapat diakui apabila mereka datang dari masyarakat – individu- atau kelompok – yang menyatakan diri sebagai korban dari pelanggaran hak asasi manusia. Komunikasi juga akan diakui apabila mereka datang dari orang atau kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang langsung dan dapat dipercaya mengenai pelanggaran-pelanggaran itu. Apabila organisasi non-pemerintahan mengajukan komunikasi mengenai pelanggaran,

⁴Resolusi Sub Komis 1 (XXIV) tanggal 13 Agustus 1971.

dalam kondisi ini organisasi non-pemerintahan bertindak dengan itikad baik sesuai dengan asas-asas hak asasi manusia yang diakui, dan mereka mempunyai bukti-bukti yang langsung dan dapat dipercaya dari situasi-situasi yang digambarkan.

Komunikasi tanpa nama tidak dapat diterima, seperti halnya komunikasi yang hanya berdasarkan laporan-laporan dari media massa.

Setiap komunikasi harus menggambarkan fakta, tujuan pengajuan pengaduan dari petisi, dan hak yang telah dilanggar. Sesuai dengan aturan, suatu komunikasi tidak akan dipertimbangkan apabila bahasanya kasar atau apabila berisi kata-kata yang menghina Negara yang ditunjuk dalam pengaduan. Apabila syarat-syarat lain telah dipenuhi dan bahasa yang kasar telah dihapus, komunikasi tersebut sebaliknya dapat dipertimbangkan.

Komunikasi tidak akan diterima apabila bertentangan dengan asas-asas dalam Piagam PBB atau apabila komunikasi menunjukkan motivasi politik.

Pemulihan domestik harus sudah dijalankan sebelum komunikasi dipertimbangkan – kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa solusi pada tingkat nasional tidak akan efektif, atau bahwa solusi ini akan melampaui jangka waktu yang layak.

Akhirnya aturan-aturan mengenai prosedur, berusaha menghindari ketidakcocokan dengan prosedur-prosedur lainnya yang sudah ada, dan untuk mencegah diulanginya pengajuan komunikasi yang telah ditangani oleh PBB.

Komunikasi yang dimaksudkan untuk ditangani berdasarkan prosedur "1503" dapat dialamatkan ke:

Centre for Human Rights

United Nations Office of Geneva

1211 Geneva 10, Switzerland.

Menyelidiki Pengaduan-Pengaduan

Kelompok Kerja Komunikasi telah menangani lebih dari 350.000 pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia antara tahun 1972 dan 1988, serta sekian ribu tanggapan dari Pemerintah-pemerintah. Jumlah pengaduan yang disampaikan oleh Kelompok Kerja dari Sub-Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas hanya sebagian kecil dari sejumlah pengaduan yang diterima, tetapi pengaduan yang ditindaklanjuti didokumentasikan dengan baik. Dalam beberapa tahun, antara 1.000 sampai 2.000 halaman dokumen dikirim kepada Sub-Komisi dengan laporan tahunan yang bersifat rahasia dari Kelompok Kerja.

Kecuali pada 1986, ketika Sub-Komisi tidak bertemu, Sub-Komisi telah menyampaikan situasi hak asasi manusia yang merupakan subjek dari pengaduan kepada Komisi Hak Asasi Manusia setiap tahun sejak 1973. Pada 1988, situasi hak asasi manusia di 44 Negara telah disimpan di Komisi.

Dialog dengan Pemerintah-Pemerintah

Dengan berjalannya waktu, prosedur hak asasi manusia dari PBB telah menjadi lebih siap untuk diterima dan dikenal oleh Pemerintah-pemerintah, dan kerja sama mereka dalam pekerjaan Komisi Hak Asasi Manusia semakin berkembang terus. Kerja Komisi melalui kontak langsung untuk membuat suatu dialog dengan pemerintah-pemerintah dari Negara-negara tempat pelanggaran hak asasi manusia diduga telah terjadi. Kontak-kontak ini dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB atau oleh perwakilan khusus, atau ahli-ahli yang mandiri yang ditunjuk oleh Komisi dan melaporkan

tugasnya kepada Komisi.

Sejumlah langkah yang telah diambil bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar Negara-negara dengan dasar prosedur "1503". Pada 1972, Sub-Komisi menggarisbawahi pentingnya menerima tanggapan dari Negara-negara mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dicantumkan dalam komunikasi yang diterimanya. Pada 1974 Komisi itu sendiri memutuskan untuk mengajukan dokumen pengaduan ke Pemerintahan yang bersangkutan, dan mengundang mereka untuk membuat komentar tertulis. Pada saat yang bersamaan, Sub-Komisi diperintahkan untuk memberitahukan maksudnya kepada Pemerintah-pemerintah untuk menyampaikan suatu situasi kepada Komisi dan mengundang pengawas dalam penulisannya. Kelima anggota Kelompok Kerja Komisi telah ditunjuk setiap tahun sejak 1974 untuk memeriksa bahan yang telah dikirimkan oleh Sub-Komisi dan pengawas Pemerintah-pemerintah, dan untuk memberikan rekomendasi mengenai aksi yang diambil dalam setiap kasus. Badan ini dikenal dengan nama Kelompok Kerja Situasi. Rekomendasi-rekomendasinya akan dikirim ke pemerintahan yang bersangkutan yang mempunyai hak untuk diwakili selama debat di dalam Komisi, dan apabila keputusan telah diambil.

Kerahasiaan

Semua aksi yang diambil berdasarkan prosedur "1503" bersifat rahasia kecuali jika Komisi telah melaporkannya ke Dewan Ekonomi dan Sosial. Sebelum tahap itu dicapai, pertemuan-pertemuan dari semua badan hak asasi manusia yang terlibat dilakukan secara tertutup, dan kerahasiaan dari catatan dan dokumentasi yang diserahkan dijaga.

Namun, sejak 1978, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia telah mengumumkan dalam sidang terbuka untuk publik nama-nama Negara yang telah diperiksa. Ketua membuat suatu perbedaan antara Negara-negara yang kondisi dan situasi hak asasi manusianya masih perlu diperiksa, dan Negara-negara yang dianggap tidak memerlukan pengambilan tindakan lebih jauh.

Setelah pemeriksaan terhadap situasi tertentu berakhir atau berdasarkan rekomendasi dari Komisi Hak Asasi Manusia, dengan inisiatifnya sendiri Dewan Ekonomi dan Sosial seringkali memutuskan kerahasiaannya dapat dicabut. Hal ini terjadi dengan kasus Equatorial Guinea pada 1979, Argentina dan Uruguay pada 1985, dan Filipina pada 1986. Pada 1987, Dewan memutuskan bahwa laporan yang bersifat rahasia dari Perwakilan Khusus Komisi mengenai situasi hak asasi manusia di Haiti, harus dinyatakan terbuka untuk publik.

Prosedur "Protokol Opsional"

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Protokol Opsionalnya mulai diberlakukan pada 23 Maret 1976. Suatu Negara yang menjadi Pihak pada Kovenan dan Protokol, mengakui bahwa Komite Hak Asasi Manusia PBB – yang terdiri dari 18 ahli, ditunjuk berdasarkan kapasitas pribadi mereka, yang berkumpul tiga kali setahun – dapat menerima dan mempertimbangkan komunikasi dari individu yang menyatakan bahwa hak asasi mereka telah dilanggar oleh Negeranya.

Dari 87 Negara yang telah mengaksesi atau meratifikasi Konvenan sampai pada akhir 1988, 43 Negara telah menerima kewenangan Komite untuk menangani pengaduan perorangan. Negara-negara itu adalah: Argentina, Austria, Barbados, Bolivia, Kamerun, Kanada, Republik Afrika Tengah, Kolombia, Kongo, Costa Rica, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, Equatorial Guinea, Finlandia, Perancis, Gambia, Hungaria, Eslandia, Italia, Jamaika, Luxemburg,

Madagaskar, Mauritius, Belanda, Nikaragua, Nigeria, Norwegia, Panama, Peru, Portugal, Saint Vincent dan Grenadines, San Marino, Senegal, Spanyol, Suriname, Swedia, Trinidad dan Tobago, Togo, Uruguay, Venezuela, Zaire, dan Zambia.

Komunikasi dari individu dipertimbangkan oleh Komite dalam pertemuan tertutup. Surat-surat mereka, dan dokumen lain dari Komite, dijaga kerahasiaannya.

Antara 1977 dan 1988, Komite telah menerima 333 komunikasi yang melibatkan 28 Negara. Dalam 76 kasus dari 88 kasus dimana Komite telah menyelesaikan tugasnya dan telah menyatakan pandangan-pandangannya, telah ditetapkan bahwasanya pelanggaran terhadap Kovenan telah terjadi. Untuk memutuskan apakah komunikasi dapat diterima dibutuhkan waktu antara 6 bulan sampai 1 tahun, dan pandangan Komite mengenai hal itu akan menyusul setahun atau dua tahun kemudian. Seluruh proses untuk menangani suatu pengaduan secara normal akan selesai dalam waktu 2 sampai 3 tahun.

Apakah Komunikasi Dapat Diterima?

Suatu komunikasi yang dapat dipertimbangkan tidak boleh tanpa nama dan harus datang dari seseorang, atau orang-orang yang tinggal di dalam wilayah hukum suatu Negara yang menjadi pihak pada Protokol Opsional. Pada umumnya, suatu komunikasi dapat diajukan oleh individu yang menyatakan bahwa hak-haknya sebagaimana dicantumkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik telah dilanggar oleh Negara tersebut. Apabila terlihat bahwa mereka yang diduga sebagai korban tidak dapat mengajukan komunikasi, Komite dapat mempertimbangkan komunikasi dari orang lain yang membenarkan kewenangannya untuk bertindak atas nama mereka yang diduga sebagai korban. Pihak ketiga yang tidak berhubungan dan tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan mereka yang diduga sebagai korban tidak dapat mengajukan komunikasi.

Pengaduan pada dasarnya harus sesuai dengan ketentuan dalam Kovenan dan pengaduan tidak dapat dipertimbangkan apabila masalah yang sama sedang diperiksa berdasarkan prosedur investigasi atau penyelesaian internasional lainnya. Semua pemulihan domestik harus dipenuhi sebelum pengaduan diajukan ke Komite.

Bahkan sebelum memutuskan apakah suatu komunikasi dapat diterima atau tidak, Komite – atau Kelompok Kerja untuk Komunikasi – dapat meminta mereka yang diduga sebagai korban atau Negara yang bersangkutan untuk menyediakan informasi tambahan tertulis atau pengamatan dan menentukan batas waktunya. Apabila pada tahap ini Negara menanggapi, orang yang mengadu akan menerima salinan untuk diberikan komentar. Apabila kasus dikembalikan kepada pengadu untuk memperoleh informasi lebih lanjut, dan kemudian ditetapkan tidak dapat diterima, tidak ada salinan yang perlu diberikan kepada Negara. Komite dapat memutuskan untuk menghentikan pengaduan tanpa keputusan tertulis. Sebagai contoh, ketika pengadu mencabutnya atau apabila ada hal-hal lain yang menunjukkan bahwa pengadu tidak bermaksud untuk meneruskan masalah tersebut.

Pada akhir Lembar Fakta, ada suatu model yang memperlihatkan bagaimana suatu komunikasi kepada Komite Hak Asasi Manusia seharusnya dibuat. Komunikasi yang dimaksudkan untuk ditangani berdasarkan Protokol Opsional harus dialamatkan ke:

Human Rights Committee
C/O Centre of Human Rights
United Nations Office of Geneva

Menilai Suatu Pengaduan

Sekali suatu komunikasi dinyatakan diterima, Komite meminta Negara yang bersangkutan untuk menjelaskan atau mengklarifikasi masalah, dan menyatakan apa saja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Batas waktu enam bulan dibuat untuk mendapat tanggapan Negara Pihak Kovenan. Kemudian pembuat pengaduan diberi kesempatan memberikan komentar atas tanggapan dari Negara. Setelah itu, Komite akan menyatakan pandangan-pandangannya dan mengirimkannya ke Negara yang bersangkutan dan ke pembuat pengaduan.

Komite menempatkan individu-individu yang mengadu dan Negara-negara yang diduga telah melanggar hak mereka, pada kedudukan yang sama sepanjang proses kerja Komite. Masing-masing mempunyai kesempatan untuk memberikan komentar terhadap argumentasi pihak lain.

Memberhentikan.....

Orang-orang yang menganggap bahwa mereka merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia mungkin membutuhkan perlindungan sebelum Komite sempat mengumumkan pandangan akhirnya. Tanpa mengurangi manfaat pengaduan tersebut, Komite seringkali harus memberikan pendapat sementara bagi Negara tertentu. Seraya menunggu penyelidikan suatu kasus, Komite memberitahu suatu Negara bahwa mereka yang diduga sebagai korban "sudah menjadi pengungsi di Negara X, tidak dapat dikembalikan atau dipaksa ke Negara Y". Dalam kesempatan lain, Komite menunjukkan keprihatinannya terhadap kondisi kesehatan seseorang yang diduga menjadi korban, dan meminta pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadapnya oleh badan kesehatan yang berkompeten. Komite juga meminta salinan dari laporan tubuh. Ada juga keputusan yang meminta suatu Negara untuk tidak melaksanakan hukuman mati selama komunikasi masih diperiksa.

Bukti dan Beban Pembuktian

Komite terikat untuk mempertimbangkan semua informasi tertulis yang disediakan baginya oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Komite belum mengembangkan fungsi penemuan fakta yang mandiri.

Dalam sejumlah kasus yang berkaitan dengan hak atas kehidupan, penganiayaan, perlakuan yang buruk, serta penahanan yang semena-mena dan orang hilang, Komite telah menetapkan bahwa pembuktian tidak dapat dibebankan kepada orang yang mengadukan pelanggaran. Komite juga mempertahankan bahwa tidak cukup untuk membuat pembuktian kesalahan dalam arti yang umum dari pengaduan pelanggaran hak asasi manusia.

Pendapat-Pendapat Pribadi

Komite Hak Asasi Manusia bekerja berdasarkan kesepakatan, tetapi masing-masing anggota pribadi dapat menambahkan pendapat mereka ke dalam pandangan-pandangan Komite tentang nilai suatu kasus. Hal ini telah terjadi dalam 9 kasus. Dalam empat kesempatan ketika komunikasi dinyatakan tidak dapat diterima, pendapat pribadi telah ditambahkan ke dalam keputusan-keputusan Komite.

Keputusan-Keputusan yang Diumumkan

Ketika suatu komunikasi sedang dipertimbangkan oleh Komite Hak Asasi Manusia, proses kerja secara total dirahasiakan. Penemuan Komite – pandangan mengenai komunikasi yang telah dinyatakan diterima dan dikaji nilainya, dan keputusan yang menyatakan komunikasi-komunikasi lain tidak dapat diterima, selalu dibuat terbuka untuk publik.

Seleksi atas keputusan Komite berdasarkan Protokol Opsional dipublikasikan. Volume I dari seri ini yang memuat sidang Komite ke dua dan ke enam belas telah dipublikasikan pada 1985. Volume II yang memuat sidang Komite ke-17 dan ke-32 dipublikasikan pada tahun 1989.

PERBEDAAN ANTARA PROSEDUR-PROSEDUR

Perbedaan utama antara prosedur menurut Resolusi 1503 (XLVIII) dan menurut Protokol Opsional dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yaitu bahwa yang pertama meliputi pemeriksaan situasi-situasi, sedang yang kedua menyangkut pemeriksaan terhadap pengaduan pribadi: peristiwa tersendiri mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi ada beberapa cara lain untuk mengungkapkan perbedaan antara kedua prosedur tersebut.

- Prosedur "1503" didasarkan pada Resolusi badan PBB: Dewan Ekonomi dan Sosial. Untuk menggunakannya, kerja sama sukarela dari Negara-negara sangat diperlukan. Prosedur "Protokol Opsional" memperoleh kewenangan dari perjanjian internasional dimana Negara-negara Pihak telah mengikatkan diri mereka untuk menerima prosedur tertentu untuk memeriksa pengaduan-pengaduan yang diajukan terhadap mereka.
- Prosedur "1503" berlaku untuk semua Negara. Menurut Protokol Opsional, prosedur berlaku hanya untuk Negara yang telah melakukan atau meratifikasi terhadap Kovenan dan Protokol.
- Pelanggaran terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar tercakup dalam prosedur pertama, sementara yang kedua hanya mengenai hak sipil dan politik yang dilindungi dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
- Orang, kelompok masyarakat atau organisasi non-pemerintahan dapat menggunakan prosedur "1503" apabila mereka mempunyai pengetahuan langsung atau tidak langsung mengenai dugaan pelanggaran. Komunikasi menurut Protokol Opsional harus ditandatangani oleh mereka yang diduga sebagai korban, atau oleh seseorang yang diberi kewenangan untuk bertindak atas nama korban.
- Penulis komunikasi menurut prosedur "1503" tidak terlibat dalam setiap tahap pelaksanaannya, mereka juga tidak diberitahu tentang tindakan yang diambil oleh PBB – kecuali jika informasi-informasi tersebut telah dinyatakan terbuka untuk umum. Penulis hanya diberitahu Sekretariat PBB bahwa komunikasi mereka telah diterima, bahwa salinannya telah dikirimkan ke Negara-negara yang bersangkutan, dan ringkasan akan diberikan kepada para anggota Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, dan kepada para anggota Komisi Hak Asasi Manusia. Penulis komunikasi mengajukan ke Komite Hak Asasi Manusia menurut Protokol Opsional, sebaliknya penulis mempunyai kedudukan yang penuh. Ia akan diberitahukan semua tindakan yang diambil oleh Komite atau Kelompok Kerja bagi Komunikasi. Negara-negara yang bersangkutan juga terus diinformasikan. Penulis mempunyai kesempatan untuk memberikan komentar terhadap pengajuan tertulis dari Negara.

CARA-CARA LAIN

Dua prosedur lain tersedia bagi masyarakat yang meyakini bahwa hak asasi mereka telah dilanggar. Kedua prosedur ini dibentuk menurut Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.

Penghapusan Diskriminasi Rasial

Individu atau kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa hak mereka sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial telah dilanggar, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 dari Konvensi, dapat menulis ke Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) PBB memohon agar pengaduan mereka dipertimbangkan. Mereka harus telah menggunakan semua upaya pemulihan domestik.

Sampai akhir 1988, 12 dari 125 Negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi, mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi menurut Pasal 14. Negara-negara itu adalah: Kosta Rika, Denmark, Ekuador, Perancis, Eslandia, Italia, Belanda, Norwegia, Peru, Senegal, Swedia, dan Uruguay.

Komunikasi yang dimaksudkan untuk ditangani oleh Komite dialamatkan ke:
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
C/O Centre for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland

Komite tidak dapat menerima komunikasi apabila menyangkut Negara yang meskipun merupakan pihak dari Konvensi, tetapi tidak mengaku kompetensi Komite untuk melakukan hal itu.

Konvensi Anti Penyiksaan

Menurut Pasal 22 Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Menurunkan Martabat, individu yang menyatakan dirinya sebagai korban dari pelanggaran hak yang dilindungi oleh Konvensi dan yang telah menggunakan segala upaya domestik yang mungkin dapat menulis ke Komite Anti Penyiksaan dan memohon pertimbangan atas kasus mereka. Pada tanggal 31 Maret 1989, 17 dari 41 Negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi, telah mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi. Negara-negara ini adalah: Argentina, Austria, Denmark, Ekuador, Perancis, Yunani, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, Togo, Tunisia, Turki, dan Uruguay.

Komunikasi-komunikasi yang dimaksudkan untuk ditangani oleh Komite dialamatkan ke:
Committee Against Torture
C/O Centre for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland

Komite tidak dapat menerima komunikasi-komunikasi yang menyangkut Negara-negara yang tidak mengakui kompetensinya menurut Pasal 22 dari Konvensi. (untuk informasi lebih lanjut, silahkan untuk mengacu pada Lembar Fakta No. 4 tentang Metode-metode Menentang Penyiksaan)

STATUS PEREMPUAN

Dua daftar yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia disiapkan setiap tahun oleh Komisi tentang Status Perempuan PBB oleh Pusat Pengembangan Sosial dan Kemanusiaan, yang berada di Wina. Salah satunya adalah daftar tidak rahasia yang berisi kesimpulan dari komunikasi yang berkaitan dengan pemajuan status perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, sipil, dan pendidikan. Daftar lain adalah daftar rahasia yang berisi kesimpulan dari komunikasi tentang dugaan pelanggaran yang mempengaruhi status perempuan.

Komunikasi yang dimasukkan untuk ditangani oleh Komisi bagi Status Perempuan dialamatkan ke:

United Nations Commission on the Status of Women
Centre for Social Development and Humanitarian Affairs
United Nations Office at Vienna
Vienna International Centre
P.O. BOX 500
1400 Vienna, Austria

BADAN-BADAN KHUSUS PBB

Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) telah membentuk peraturan internasional dalam membela hak asasi manusia dan mengawasi pelaksanaannya.

Komite para ahli menerima laporan secara teratur dari pemerintah dari Negara-negara yang mengadakan perjanjian mengenai tindakan yang telah mereka ambil untuk menyesuaikan diri dengan konvensi-konvensi yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi ini. Terdapat pula prosedur untuk menangani pengaduan dan pertikaian tentang pelaksanaan atau penafsiran dari konvensi-konvensi yang telah diratifikasi.

Prosedur khusus dari ILO telah ditetapkan untuk meliputi kebebasan berserikat dimana pengaduan dapat diajukan terhadap Negara-negara, bahkan apabila mereka tidak terikat oleh konvensi-konvensi mengenai subjek ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang prosedur tersebut silahkan menulis ke :

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)
Human Rights and Peace Division
7, Place de Fontenoy
75700 Paris, France
International Labour Organisation (ILO)
International Labour Standards Department
4, Route des Morillons
1211 Geneva 22, Switzerland

MODEL KOMUNIKASI

Tanggal:.....

Komunikasi ke:

The Human Rights Committe
C/OThe Centre for Human Rights
United Nations Office
8-14 avenue de la Paix
1211 Geneva 10, Switzerland

diajukan untuk dipertimbangkan sesuai dengan Protokol Opsional dari Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

1. Informasi mengenai penulis komunikasi

Nama..... Nama Keluarga.....
Warganegara..... Pekerjaan.....
Tanggal dan tempat lahir.....
Alamat sekarang.....
.....

Alamat untuk korespondensi rahasia (apabila lain dari alamat sekarang).....
.....

Mengajukan komunikasi sebagai:

- (a) korban pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran yang dinyatakan dibawah
- (b) wakil yang ditunjuk/penasehat hukum dari mereka yang diduga sebagai korban
- (c) lain-lain.....

Apabila kotak (c) diberi tanda, penulis harus menjelaskan:

(i) Dalam kapasitas apa ia bertindak atas nama korban (contoh: hubungan keluarga atau hubungan pribadi lain dengan mereka yang diduga sebagai korban)
.....

(ii) Alasan mengapa korban tidak mampu mengajukan komunikasi sendiri:
.....

Pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan dengan korban tidak dapat mengajukan komunikasi atas nama korban tersebut.

II. Informasi mengenai mereka yang diduga sebagai korban

(apabila berbeda dari penulis)

Nama..... Nama pertama.....
Kewarganegaraan..... Pekerjaan.....
Tanggal dan tempat lahir.....
Alamat sekarang atau tempat tinggal.....
.....

III. Negara yang bersangkutan/pasal-pasal yang dilanggar/pemulihan domestik

Nama Negara Pihak Kovenan Internasional dan Protokol Opsional, yang menjadi tujuan komunikasi
.....

Pasal-pasal dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang diduga
dilanggar.....

Langkah-langkah yang telah diambil oleh atau atas nama mereka yang diduga sebagai korban, untuk menyelesaikan
pemulihan domestik – jalan ke pengadilan atau pejabat-pejabat publik yang berwenang lainnya, kapan dan apa hasil-
hasilnya (apabila mungkin, melampirkan salinan dari keputusan pengadilan dan administratif yang relevan):
.....

Apabila pemulihan domestik belum dipenuhi, terangkan sebabnya:
.....

IV. Prosedur-prosedur internasional lainnya

Apakah persoalan yang sama telah diajukan untuk diperiksa menurut prosedur investigasi atau penyelesaian internasional
lainnya (sebagai contoh: Komisi Hak Asasi Manusia Inter Amerika, Komisi Hak Asasi Manusia Eropa)? Apabila ya,
kapan dan bagaimana hasilnya?

V. Fakta-fakta peristiwa yang dilaporkan

Uraikan dengan terperinci fakta dugaan pelanggaran yang terjadi (termasuk tanggal-tanggal yang relevan)
.....

Tanda tangan Penulis: